

WEBINAR SHARING KNOWLEDGE PINJAMAN DAERAH SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAERAH PALEMBANG, 14 JUNI 2021

FREQUENTLY ASK QUESTION

No	Tema Pertanyaan	Pertanyaan (sesuai pertanyaan asli penanya)	Jawaban
1	Kendala dalam Proses pengajuan Pinjaman.	apa saja yang menjadi tantangan dalam proses pengajuan dan pelaksanaan pinjaman daerah di Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA)?	Meyakinkan para tokoh masyarakat dan anggota DPRD Kab. MUBA agar dapat menyetujui rencana pinjaman daerah oleh Pemkab. Musi Banyuasin dan juga memenuhi pengujian dokumentasi syarat pengajuan pinjaman dan cash flow untuk pengembalian pinjaman dari PT. SMI dan DJPK
2	Study Kelayakan pra pengajuan Pinjaman.	Upaya apa yang dilakukan pemda untuk meningkatkan investasi di Kabupaten MUBA?	Memiliki arah yang sejalan dengan Pemerintah Pusat dan berkomitmen serta dapat melihat peluang investasi yang ada. Jika terdapat proyek infrastruktur besar seperti jalan tol yang akan bersinggungan dengan wilayah Kabupaten, maka Pemkab akan membangun infrastruktur pendukung yang dapat menunjang ekonomi masyarakat sekitar proyek tersebut. Dengan tersedianya kuantitas dan kualitas infrastruktur yang memadai akan bisa mendatangkan para investor untuk berinvestasi di Kab. MUBA. Selain itu Kabupaten MUBA memiliki potensi Migas yang besar.
3	Study Kelayakan pra pengajuan Pinjaman.	Bagaimana Kabupaten MUBA memanage keuangan daerah, terutama cashflow untuk pembayaran kewajiban pinjaman ditengah dampak Pandemi Covid-19?	Kunci nya pada komitmen di awal, bahwa semua pengeluaran yang diakibatkan dari pinjaman harus selesai dalam satu periode kepemimpinan dan tidak meninggalkan beban bagi kepemimpinan selanjutnya. Membuat Tim Khusus yang diketuai Sekda yang memastikan ketersediaan alokasi untuk memenuhi Kewajiban dan selalu dilakukan monitoring oleh Bupati
4	Study Kelayakan pra pengajuan Pinjaman.	Belanja yg tidak efektif & efisien membahayakan pengelolaan pinjaman. Apa ukuran belanja yg bersumber dari pinjaman daerah telah efektif & efisien? Apakah pemda dimungkinkan melakukan municipal bond?	Menilainya dari beberapa indikator antara lain : Efektifitas Belanja Pemda Akselerasi Penyerapan Anggaran), SILPA dalam APBD, DSCR (Debt Services Coverage Ratio) sebesar 2,5% dari Outstanding pinjaman dan nilai yang tercantum pada rencana KAK Selanjutnya SILPA dalam APBD, efektivitas belanja dari pemda belum efektif. DSCR (Rasio untuk kemampuan pembayaran Pokok dan Bunga) yakni sebesar 2,5 dari hutang existing
5	Study Kelayakan pra pengajuan Pinjaman.	Apakah dimungkinkan pemda di Indonesia menyelenggarakan pinjaman daerah dalam bentuk Municipal Bonds untuk membiayai proyek, yang meng-generate penerimaan daerah, karena sepengetahuan saya pinjaman daerah yang sedang dibahas di sini adalah pinjaman privat/private borrowings yang berasal dari satu pihak (PT SMI). Terima kasih?	Municipal bond belum dapat diberlakukan oleh pemda saat ini.



No	Tema Pertanyaan	Pertanyaan (sesuai pertanyaan asli penanya)	Jawaban
6	Pengajuan Pinjaman dalam Proses	Assalamualaikmu, YTH Bapak/Ibu. Saya SEKDA kota Lubuklinggau. Kita mau kepastian dari PT SMI, Kita sudah ajukan sejak tahun 2020. Sekarang sudah kita perbaharui awal tahun 2021. Kita sudah menerima balasan surat dari SMI mengatakan permohonan kami sudah diterima. Kita ingin kepastian dari PT SMI sekarang sudah bulan juni, kapan lagi kita bias menggunakan dana pinjaman ini sedangkan anggaran dana ini sudah kita masukan di APBD tahun 2021. Mohon penjelasannya terima kasih.	Seperti yang sudah disampaikan dari pak bhima widyajala terkait dengan pemilihan tenor dan tingkat suku bunga karena sesuai dengan KMK yang terbaru harus menyebutkan tenor. Tenor menentukan kapasitas utang. Kita berkoordinasi untuk meluluskan permohonan ini. Prediksi target penandatanganan loan agreement terhadap 8 pemda pada minggu pertama Juli 2021.
7	Study Kelayakan pra pengajuan Pinjaman.	Dalam proses project selection untuk menentukan prioritas proyek infrastruktur yang akan diusulkan kepada PT SMI kendala apa yg dihadapi Pemda, persetujuan DPRD?	Persetujuan DPRD bisa dibangun melalui persuasi para tokoh masyarakat dan Anggota DPRD. Kendala/ tantangan nya adalah membangun komunikasi dan berkomitmen.
8	Study Kelayakan pra pengajuan Pinjaman.	Apakah potensi sumber daya mineral suatu daerah juga mempengaruhi terhadap penilaian suatu pengajuan pinjaman daerah?	Sesuai dengan PP 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, salah satu indikator yang dinilai adalah proyeksi kemampuan fiskal daerah dalam membayar kembali kewajiban pinjaman selama masa pinjaman, yang biasa dikenal dengan debt service coverage ratio (DSCR). Salah satu komponen yang dihitung dalam DSCR tersebut adalah nilai Dana Bagi Hasil (DBH) yang didalamnya termasuk DBH Sumber Daya Alam. Oleh karena itu, potensi sumber daya mineral suatu daerah secara tidak langsung diperhitungkan dalam menilai pinjaman daerah yang tercermin dari proyeksi DBH yang akan diperolehnya sepanjang masa pinjaman.
9	Prosedur Pengajuan Pinjaman	Apa saja langkah langkah yang harus dilakukan pemda untuk mendapat pinjaman PEN dari PT SMI?	Pemda melakukan peran yang komprehensif dan meyakinkan para semua stake holder, bahwasannya kita tidak bisa bergantung hanya pada dana transfer untuk pembangunan. Perlu dana pinjaman lain yakni pinjaman daerah guna mewujudkan pembangunan infrastruktur tersebut.
10	Prosedur Pengajuan Pinjaman	Kabupaten MURATARA akan mengajukan pinjamn tahun 2021: 1.Masih bisakah pinjaman ke PEN tuk thn 2021/2022. 2.Apakah bisa pinjaman digunakan untuk mebngunan gedung kantor bupati&DPRD	Bisa diajukan asal sesuai kmk yang ditentukan, termasuk rincian tenor pembayaran Usulan pinjaman PEN tahun 2021 sebagai berikut : Untuk tahap I, sampai dengan 31 Mei 2021, usulan pinjaman PEN 2021 sebesar Rp. 30,05 triliun dari 77 pemerintah daerah Untuk tahap II, sampai dengan 11 Juni 2021, usulan pinjaman PEN 2021 sebesar Rp. 1,35 triliun dari 4 pemerintah daerah Status permohonan pinjaman PEN Daerah 2021 dari pemda provinsi sumatera selatan dan kabupaten banyuasin adalah pemda diminta melengkapi dokumen dan informasi dalam rangka penilaian. Diharapkan pada bulan Juli 2021 dapat melaksanakan perjanjian pemberian pinjaman.

No	Tema Pertanyaan	Pertanyaan (sesuai pertanyaan asli penanya)	Jawaban
11	Persyaratan pengajuan Pinjaman	Bagaimana tentang NPL pinjaman Pemda, Punishmnet apa jika pemda tidak mampu mengembalikan pokok dan bunga pinjaman.apa jaminannya utk PT,SMI	PT SMI selaku lembaga pembiayaan yang tunduk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengharuskan setiap pembiayaan yang diberikan harus terdapat jaminan/agunan aset. Namun, UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengatur bahwa Pemerintah Daerah dilarang menjaminkan aset dan pendapatannya dalam melakukan pinjaman. Untuk menjembatani kedua peraturan tersebut, PT SMI mendapatkan jaminan dari Pemerintah Pusat c.q. Menteri Keuangan dan jaminan tersebut diatur dalam PMK 174/PMK.08/2016. Dalam PMK tersebut diatur dalam hal terjadi tunggakan atas Pinjaman Daerah, Menteri Keuangan akan membayarkan tunggakan tersebut kepada PT SMI dan kemudian Menteri Keuangan akan memotong Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12	Persyaratan pengajuan Pinjaman	1. Kami mendapatkan informasi, untuk pinjaman PEN Daerah pada tahun 2021 diarahkan ke project- yang pelaksanaannya selesai pada tahun 2021. Bagaimana dengan usulan project yang secara proses, tahapan dan waktu tidak bisa diselesaikan pada tahun 2021, apakah diberikan kesempatan multi years? 2. Apakah jika kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan tahun 2021, masih bisa kami usulkan tahun 2022? 3. Apakah jika ada kesempatan mengajukan usulan pada tahun 2022 , kami diperbolehkan merubah jenis usulan project?	Untuk multiyears prinsipnya boleh. Namun harus ada persetujuan dari DPRD pada saat pembahasan APBD ada pembiayaan secara multiyears. Tetapi bila mau mengajukan ulang juga boleh. Nanti akan ada evaluasi dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan PT SMI untuk melihat apakah project yang diajukan lagi itu masih relevan
13	Persyaratan pengajuan Pinjaman	Asalamualaikum...kabupaten lahat belum sesuai dengan kmk.125...kira2x.persyaratan apa saja yang wajib dipenuhi terimakasih	Kabupaten Lahat dan Kota Palembang diharapkan dapat menyampaikan surat minat/permohonan sesuai KMK nomor 125/2021 (pemilihan tenor dan tingkat suku bunga)
14	Persyaratan pengajuan Pinjaman	Apakah PT SMI meminta agunan saat memberikan Pinjaman Daerah? karena yang namanya pinjaman sangat mungkin terjadi adanya masalah, misalnya kredit macet. Adanya kredit macet ini biasanya karena adanya pemekaran dan/atau berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang berhutang. Jika hal ini terjadi, apakah ada proses restrukturisasi atau mungkin bahkan pemutihan? karena hal-hal seperti ini juga terjadi di masa lalu. Demikian, terima kasih.	Pemberian pinjaman harus memenuhi syarat diantaranya jumlah sisa pinjaman ditambah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Juga memenuhi nilai rasio kemampuan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah (Debt Services Coverage Ratio/ DSCR) paling sedikit sebesar 2,5.

FREQUENTLY ASK QUESTION (Pertanyaan yang sering diajukan)

- | | |
|---|--|
| 1 | 6 Study Kelayakan pra pengajuan Pinjaman. |
| 2 | 4 Persyaratan pengajuan Pinjaman |
| 3 | 2 Prosedur Pengajuan Pinjaman |
| 4 | 1 Kendala dalam Proses pengajuan Pinjaman. |
| 5 | 1 Pengajuan Pinjaman dalam Proses |

14

Palembang, Juni 2021
Notulen



Afif Bakhrin
NIP. 197109271999031001